

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola perusahaan (GCG) sangat penting artinya bagi semua perusahaan secara global. Tidak hanya memberikan transparansi fungsional tetapi juga membantu dalam mendapatkan pengakuan internasional. Praktik tata kelola meningkatkan akuntabilitas manajemen yang mengarah ke fungsi yang lebih baik. Lingkungan bisnis global saat ini, berdaya saing tinggi tekanan dan serangkaian penipuan perusahaan telah meningkatkan pentingnya GCG perusahaan di negara berkembang. Sejak 1990-an, topik penelitian ini menarik banyak perdebatan ekonomi di negara maju dan berkembang. Di India diskusi tentang tata kelola perusahaan diangkat setelah penipuan Satyam yang mengungkapkan masalah regulasi di negara ini. Konsep itu telah muncul sebagai subjek yang paling banyak dibicarakan untuk akademisi dan pembuat kebijakan di bidang akuntansi dan keuangan. Intensitas penelitian di bidang ini telah meningkat dan telah dieksplorasi lebih lanjut di negara-negara maju, tetapi di negara-negara berkembang masih pada tahap awal. Para pembuat kebijakan di kedua jenis ekonomi didorong untuk mengambil topik ini dan mencari kemungkinan reformasi dalam hukum CG. Dalam latar belakang ini, analisis komprehensif perusahaan tata kelola dan kinerja perusahaan perlu dilakukan untuk mengurangi sumber ketidakefektifan dalam dunia usaha. **(Saini & Singhania, 2017).**

Perkembangan dalam literatur tata kelola perusahaan mengungkapkan keprihatinan tentang pentingnya memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Kebutuhan akan tata kelola perusahaan yang baik adalah dibuktikan dengan berbagai reformasi dan standar yang dikembangkan tidak hanya di tingkat negara, tetapi juga di tingkat internasional (misalnya,

Sarbanes-Oxley Act di AS, Combined Code di Inggris, dan Organisasi untuk Pembangunan Ekonomi [OECD] Code). Biasanya, dalam ekonomi dan literatur manajemen strategis, tata kelola perusahaan dianggap sebagai institusi untuk mengurangi efek dari masalah keagenan yang ada di organisasi. **(Wan yussof & Alhaji, 2012).**

Keberhasilan perusahaan di berbagai negara diasumsikan bahwa GCG dapat dijadikan alat pemantauan oleh dewan direksi, yang dapat menurunkan masalah agensi antara manajemen dan pemegang saham, contohnya pertumbuhan ekonomi yang cepat di Uni Emirat Arab (UEA) yang sebagian besar bersandar pada ketersediaan sumber daya, tingkat pajak rendah, dan pasar modal terbuka, UEA telah menjadi lingkungan yang menarik untuk investasi asing. Dengan globalisasi, pemerintahan yang efektif pemantauan dan perlindungan investasi diperlukan. Untuk mempertahankan daya tariknya sebagai pusat investasi, pemerintah UEA bekerja untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang kuat kepada investor lokal dan asing. Ini dicapai dengan memaksakan CG yang baik pada perusahaan. Dalam keterlibatannya dengan globalisasi, UEA mengeluarkan kode CG pertama pada 2007. Pada 2009, Kementerian Ekonomi UEA telah mengeluarkan kode CG lain yang wajib untuk publik perusahaan. **(Farhan, Obaid, & Azlan, 2017).**

Temuan penting bagi regulator, investor, akademisi, dan orang lain bahwa tata kelola perusahaan yang baik penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan likuiditas pasar. Dengan begitu banyak peraturan terbaru yang berfokus pada tata kelola perusahaan, seperti yang didasarkan pada Sarbanes-Oxley Act dan yang terbaru standar pencatatan saham yang diberlakukan oleh bursa utama AS, ada pandangan luas tentang tata kelola perusahaan yang lebih baik dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang lebih baik. **(Lawrence D, J. Mack, & Marcus L., 2004).**

Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem atau proses dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam

perusahaan, seperti pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi untuk pencapaian tujuan perusahaan. Di Indonesia, tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan, karena krisis ekonomi dan moneter yang melanda negara ini pada tahun 1997-1999. Krisis ini terjadi karena masih banyak perusahaan yang belum mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten, khususnya dalam etika bisnis perusahaan. Dalam kasus WorldCom dan Enron di Amerika Serikat emphasized tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik untuk diterapkan di perusahaan. Sebuah penelitian dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) mengidentifikasi kurangnya tata kelola perusahaan sebagai kontributor utama dampak terjadinya krisis.

Dengan demikian, krisis keuangan Asia menjadi faktor momentum yang signifikan, mendorong reformasi tata kelola perusahaan di Asia, khususnya di Indonesia. Indonesia telah meningkatkan tata kelola perusahaan melalui organisasi dan peraturan. Tonggak sejarah tata kelola perusahaan di Indonesia adalah (1) Pembentukan Nasional Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (3) Kode GCG (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Perkembangan terbaru sektor keuangan Indonesia dengan berdirinya Jasa Keuangan Otoritas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bursa Efek Indonesia (BEI) yang didirikan setelah merger Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. **(Herdjiono & Sari, 2017).**

Kehadiran tata kelola perusahaan yang baik (GCG) mutlak diperlukan oleh suatu organisasi, mengingat GCG membutuhkan sistem tata kelola yang baik yang dapat membantu membangun kepercayaan pemegang saham dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan diperlakukan sama. Sistem yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada pemegang saham untuk memulihkan investasi mereka secara wajar, tepat dan efisien, dan memastikan bahwa manajemen bertindak untuk keuntungan perusahaan. **(Mahrani, 2018).**

Tujuan setiap perusahaan adalah meningkatkan jumlah uang yang diterima pemegang saham. Nilai perusahaan maksimum akan menghasilkan peningkatan laba bagi pemegang saham, masalah keagenan merupakan kendala dalam mencapai tujuan. Masalah keagenan berasal dari pemisahan antara kepemilikan perusahaan dan manajemen perusahaan. Manajer profesional yang tidak memiliki saham atau sedikit sekali saham di perusahaan adalah mereka yang bertanggung jawab untuk menjalankan sebagian besar perusahaan besar. Akibatnya, para manajer ini merasa mereka memiliki wewenang untuk menjalankan perusahaan tanpa memperhitungkan kepentingan pemegang saham. Indonesia telah berpartisipasi dalam Zona Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan oleh karena itu, ada kebutuhan dan motivasi bagi perusahaan Indonesia untuk meningkatkan kegiatan bisnis mereka dan keunggulan kompetitif. Untuk bertahan dari persaingan bisnis di Asia Tenggara, perusahaan Indonesia harus meningkatkan sistem manajemen mereka, meningkatkan kinerja keuangan dan operasi, meningkatkan tingkat kepercayaan investor dan menciptakan akses bagi investor. Kinerja keuangan menunjukkan seberapa efektif dan efisien suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Meningkatkan kinerja keuangan menjadi persyaratan bagi perusahaan untuk menarik investor. **(Kurniati, Handayani, & Rahayu, 2018).**

Salah satu tolok ukur yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menilai manfaat suatu perusahaan adalah melalui kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik dapat mendorong minat investor untuk berinvestasi di perusahaan. Return on Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan dengan mengungkapkan berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Manajemen, sebagai pihak yang diberi delegasi pemilik modal untuk mengoperasikan perusahaan, perlu terus dipantau. Kepentingan yang berbeda yang dimiliki oleh pemilik modal dan manajemen dapat menyebabkan disintegrasi dalam perusahaan. Dengan Good Corporate Governance (GCG), wewenang semua pihak di

perusahaan dapat diatur dan fungsi pengawasan dapat dioptimalkan untuk mengurangi terjadinya penipuan yang dilakukan oleh berbagai pihak di perusahaan demi kepentingannya. Keberadaan GCG diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan yang mungkin terjadi yang menghambat kemajuan kinerja keuangan perusahaan (**Andriana & Panggabean, 2017**).

Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Tujuan utama dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Tata kelola perusahaan yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Investor atau manajer menggunakan laporan untuk membuat keputusan tentang investasi. (**Naimah & Hamidah, 2017**).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) oleh perusahaan di Indonesia. Pasalnya, penerapan GCG di Indonesia saat ini realif tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan, hanya dua emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 Emiten Terbaik dalam Praktik GCG di ASEAN dalam ajang penganugerahan ASEAN Corporate Governance Awards 2015 yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) di Manila, Filipina. Kedua emiten tersebut yaitu PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pencapaian Indonesia ini tentu masih tertinggal jauh dari Thailand yang mampu menempatkan 23 emiten, Filipina 11 emiten, Singapura 8 emiten dan Malaysia 6 emiten. Wimboh mengungkapkan penerapan GCG yang baik adalah aspek utama untuk membangun fundamental perusahaan yang kokoh. Menurut Wimboh, kinerja keuangan perusahaan tidak akan berkelanjutan bila tidak dilandasi oleh praktik-praktik tata kelola yang baik. Selain itu, ia menilai laporan tahunan yang didukung

GCG akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan investor. Meningkatnya kepercayaan investor, kata Wimboh, pada akhirnya bisa mendorong investasi baik dari investor dalam negeri maupun investor asing melalui beragam produk pasar modal di Indonesia maupun melalui investasi langsung. Masuknya dana baik dari investor lokal maupun asing tentu harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik dan secara transparan dilaporkan dalam laporan tahunan. **(Umbu, 2018).**

Laporan keuangan merupakan salah satu media yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari aktualisasi aspek kinerja manajer. Ukuran kinerja untuk membantu menerapkan strategi dan pengendalian manajemen sebagai faktor keberhasilan penting (*critical success factors*) jangka pendek dan jangka panjang. Ukuran kinerja merupakan suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan perusahaan mengimplementasikan keberhasilan strategi manajemen tanpa melakukan manipulasi data keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak luar pemakai yang berkepentingan (*stockholders*) menjadi indikator perusahaan untuk jangka pendek dan jangka panjang serta meyakinkan investor khususnya saat penawaran saham. **(Tumpal Manik, 2011).**

Kinerja didefinisikan sebagai sebuah hasil kerja yang dapat dicapai oleh setiap individu maupun kelompok. Di dalam suatu perusahaan apabila dilakukan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan yang tidak melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan moral dan etika. Sedangkan kinerja perusahaan merupakan hasil yang diperoleh dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen. Maka dari itu dalam menilai kinerja perusahaan melibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan yang telah dibuat dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif. Pada sisi kinerja keuangan merupakan faktor yang dapat menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan. **(Asna, 2017).**

Kinerja keuangan bagi investor suatu perusahaan adalah melihat kinerja yang dihasilkan dalam sektor keuangan berjalan dengan baik. Oleh karena itu perusahaan berkewajiban melakukan pengungkapan kinerja keuangan secara transparan atau tidak disembunyikan berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah yang memberikan bentuk informasi serta menggambarkan kondisi kinerja dari perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai bentuk dari prestasi. Kinerja perusahaan mewakili kemajuan maupun kemunduran suatu perusahaan. Kinerja keuangan merupakan hasil dari berbagai keputusan secara perorangan yang dibuat terus menerus oleh manajemen. **(Dewi, Sari, & Abaharis, 2018).**

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mencapai prestasi dalam mengelola dan mengendalikan aset yang dapat diukur dengan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba setiap tahunnya.

Komposisi dewan direksi warga negara asing dapat dilihat dari hasil diversifikasi etnis dalam suatu perusahaan. Dengan adanya dewan direksi warga negara asing, maka perusahaan mampu mengangkat citra perusahaan karena kesan warga negara asing lebih memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidangnya. Yang pada akhirnya hal ini akan meningkatkan nilai perusaha, keberadaan mereka dinilai membawa opini, perspektif, bahasa, keyakinan, latar belakang keluarga, dan pengalaman profesional yang beragam, sehingga memperkaya pengetahuan bisnis dan alternatif penyelesaian masalah kompleks. Selain itu, keberadaan anggota dewan direksi asing mampu meyakinkan investor asing bahwa perusahaan dikelola secara professional. **(Astuti, 2017).**

Sedangkan menurut **(Hidayati, 2017)** berpendapat bahwa anggota dewan asing dapat membawa opini dan perspektif yang beragam bahasa, agama, pengalaman pendidikan, budaya kehidupan dan profesionalitas yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Namun,

karakteristik dari anggota dewan asing tersebut belum mampu dalam upaya meningkatkan Nilai Perusahaan.

Jumlah dewan direksi dalam Wikipedia (2014) yaitu, direktur (dalam jumlah jamak disebut dewan direksi) adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan. Direktur adalah seseorang yang mengelola perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan. Di Indonesia pengaturan terhadap direktur terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Seorang direktur atau dewan direksi dalam jumlah direktur dalam suatu perusahaan (minimal satu), yang dapat dicalonkan sebagai direktur, dan cara pemilihan direktur ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. **(Syarifah, 2015).**

Menurut **(Rahmawati, Rikumahu, & Dillak, 2017)**, direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

Komisaris Independen pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris, direksi, pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. BEI mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30% dari anggota dewan komisaris. Pengukuran komisaris

independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persentase jumlah komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (**Dewi, Sari, & Abaharis, 2018**), didalam menentukan komposisi dewan komisaris di diperlukan alat ukur yaitu jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota dewan komisaris. Jumlah dewan komisaris independen lebih besar maka dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak secara tepat dan mampu melindungi seluruh stakeholder perusahaan. Hal ini akan berhubungan dengan semakin objektifnya pengakuan beban atau laba yang dimiliki perusahaan.

Menurut (**Asna, 2017**), komisaris independen adalah anggota yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham maupun keluarga dengan dewan komisaris lainnya maupun direksi yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen bertindak sebagai wakil dari stakeholder untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Pada dasarnya diharapkan semua komisaris bersifat independen, yang diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, tanpa pengaruh dari berbagai pihak lainnya. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) diantara berbagai kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (**Adestian Y. , 2018**), yang membahas tentang Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Pada Kinerja Perusahaan Perbankan yang Listing Di BEI tahun 2012-2014. Hasil peneltian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan dewan komisaris

independen, dewan direksi, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tugiman, Budiono, & Malau, 2018), yang membahas tentang” Pengaruh *Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial variabel dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ROE sebagai proksi kinerja keuangan. sedangkan variabel komisaris independen dan *corporate social responsibility* berpengaruh secara parsial terhadap ROE sebagai proksi kinerja keuangan. Sedangkan secara simultan variabel komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap ROE sebagai proksi kinerja keuangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sihotang, 2017), yang membahas tentang “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi, Komite Tata Kelola Terintegrasi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Konglomerasi”. Hasil penelitian adalah bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, komite tata kelola terintegrasi tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang sekarang fokus pada “Pengaruh Direksi Asing, Jumlah Dewan Direksi, Komisaris Independen, dengan *Leverage* sebagai variabel kontrol terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Lemahnya penerapan *corporate governance* menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan.
2. Lemahnya sistem kinerja perusahaan menjadi masalah penting di Indonesia
3. Adanya ketidakadilan antara pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya
4. Kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan komite audit.
5. *Agency theory* yang menjelaskan terjadinya pemisahan pengelolaan dalam suatu perusahaan.
6. Kurangnya penerapan GCG menyebabkan seringnya terjadi praktek manajemen laba di dalam perusahaan.
7. Minimnya jumlah komisaris independen dan komite audit dalam perusahaan menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap operasional perusahaan.
8. Kurangnya tata kelola perusahaan sebagai kontributor utama dampak terjadinya krisis ekonomi.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan masalah diatas penulis hanya meneliti pengaruh dewan direksi asing, jumlah dewan direksi, komisaris independent sebagai variabel independen dan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen dengan leverage sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah yang telah dilakukan sebelumnya dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh dewan direksi asing terhadap kinerja perusahaan?
2. Adakah pengaruh jumlah dewan direksi terhadap kinerja perusahaan?

3. Adakah pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan?
4. Adakah dewan direksi asing, jumlah dewan direksi, komisaris independen, secara simultan mempengaruhi kinerja perusahaan?
5. Adakah pengaruh dewan direksi asing terhadap kinerja perusahaan dengan leverage sebagai variabel kontrol?
6. Adakah pengaruh jumlah dewan direksi terhadap kinerja perusahaan dengan leverage sebagai variabel kontrol?
7. Adakah pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan dengan leverage sebagai variabel kontrol?
8. Adakah Leverage berpengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan?
9. Adakah dewan direksi asing, jumlah dewan direksi, komisaris independen, secara simultan mempengaruhi kinerja perusahaan dengan leverage sebagai variabel kontrol?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris tentang :

1. Pengaruh dewan direksi asing terhadap kinerja perusahaan
2. Pengaruh jumlah dewan direksi terhadap kinerja perusahaan.
3. Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.
4. Pengaruh dewan direksi asing, jumlah dewan direksi, komisaris independent terhadap kinerja perusaha.
5. Pengaruh dewan direksi asing terhadap kinerja perusahaan dengan leverage sebagai variabel kontrol.
6. Pengaruh jumlah dewan direksi terhadap kinerja perusahaan dengan leverage sebagai variabel kontrol.

7. Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan dengan leverage sebagai variabel kontrol.
8. Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Perusahaan
9. Pengaruh dewan direksi asing, dewan direksi, komisaris independen, secara simultan mempengaruhi kinerja perusahaan dengan leverage sebagai variabel kontrol.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh didalam penelitian ini memiliki manfaat positif bagi :

1. Bagi manajemen perusahaan, dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui kemajuan dan kinerja perusahaan.
2. Bagi perusahaan sejenis, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya keanggotaan dewan luar negeri dalam tata kelola perusahaan.
3. Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang membaca penelitian ini terutama yang berkaitan dengan dewan direksi, komisaris independen, terhadap kinerja perusahaan.
4. Bagi praktisi, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan secara mendalam mengenai pengaruh dewan direksi asing, jumlah dewan direksi, komisaris independen, terhadap kinerja perusahaan.
5. Bagi riset selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan atau alat replikasi bagi peneliti di masa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

